

**EFEKTIFITAS PERLINDUNGAN HUKUM MEREK DAGADU DJOKDJA
TERHADAP PERSAMAAN PADA POKOKNYA ATAU KESELURUHANNYA
(STUDI IMPLEMENTASI PASAL 3 UNDANG-UNDANG NO.15 TAHUN 2001
TENTANG MEREK DI PT. ASELI DAGADU DJOKDJA)**

ARTIKEL ILMIAH

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

YUANDHI TRI FAUZI SYADALI

NIM. 0810113116



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2012

LEMBAR PERSETUJUAN

**EFEKTIFITAS PERLINDUNGAN HUKUM MEREK DAGADU DJOKDJA
TERHADAP PERSAMAAN PADA POKOKNYA ATAU KESELURUHANNYA
(STUDI IMPLEMENTASI PASAL 3 UNDANG-UNDANG NO.15 TAHUN 2001
TENTANG MEREK DI PT. ASELI DAGADU DJOKDJA)**

Disusun Oleh:

YUANDHI TRI FAUZI SYADALI

NIM: 0810113116

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Indrati, S.H., M.S

Sentot Prihandajani S.H., M.Hum

NIP:1948022219800322001

NIP:196004231986011002

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata

Siti Hamidah, S.H.M.M

NIP:196606221990022001

LEMBAR PENGESAHAN

**EFEKTIFITAS PERLINDUNGAN HUKUM MEREK DAGADU DJOKDJA
TERHADAP PERSAMAAN PADA POKOKNYA ATAU KESELURUHANNYA
(STUDI IMPLEMENTASI PASAL 3 UNDANG-UNDANG NO.15 TAHUN 2001
TENTANG MEREK DI PT. ASELI DAGADU DJOKDJA)**

Disusun Oleh:

YUANDHI TRI FAUZI SYADALI

NIM: 0810113116

Skripsi ini telah disahkan Dosen Pembimbing pada tanggal.....2012

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Indrati, S.H., M.S

NIP:1948022219800322 001

Sentot Prihandajani S.H., M.Hum

NIP:196004231986011002

Ketua majelis Penguji

Kepala Bagian Hukum Perdata

Adum Dasuki., S.H., M.Sos

NIP:1948052219780310 02

Siti Hamidah., S.H., M.M

NIP:19660221990022 001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya

Dr.Sihabudin., S.H., M.H

NIP: 195912161985031001

**Efektifitas Pelaksanaan Perlindungan Hukum Merek Dagadu Djokdja Terhadap
Persamaan Pada Pokoknya Atau Keseluruhan (Implementasi Pasal 3 Undang-Undang
No.15 Tahun 2001 tentang Merek)**

Yuandhi Tri Fauzi Syadali

ABSTRAK

Perkembangan perekonomian dan perdagangan di Indonesia telah memperluas transaksi barang dan jasa yang diperdagangkan sehingga perlu adanya merek sebagai jaminan kualitas terhadap produk barang dan jasa tersebut. Perlindungan merek dapat dilakukan dengan cara mendaftarkan merek kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan demikian pemilik merek terdaftar akan mendapatkan hak eksklusif berupa sertifikat merek untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakannya. Perlindungan hak merek tersebut di atas tertuang dalam Pasal 3 Undang-undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Perlindungan merek dalam kenyataannya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh PT. Aseli Dagadu Djokdja selaku pemilik merek terdaftar Dagadu Djokdja karena para pedagang kaki lima serta produsen yang berada di Pasar Malioboro Yogyakarta melakukan pelanggaran hak dengan menjual kaos oblong merek dagadu Djokdja yang serupa dengan milik PT. Aseli Dagadu Djokdja. Hal tersebut menimbulkan kerugian bagi pemilik merek terdaftar Dagadu Djokdja.

Perlindungan merek Dagadu Djokdja terhadap pelanggaran hak merek yang terjadi perlu adanya komponen efektifitas hukum antara lain: substansi Undang-undang, Penegak hukum, masyarakat dan budayanya agar pelaksanaan perlindungan hukum merek tersebut bisa tercapai serta perlu adanya ketegasan dari pemilik merek untuk menggugat para pelanggar hak merek Dagadu Djokdja ke jalur hukum

Kata kunci: Efektifitas, pelaksanaan, perlindungan, merek Dagadu Djokdja

ABSTRACT

Economic development and trade in Indonesia has expanded the transactions of goods and services traded so that the need for the brand as a guarantee of quality for products and services. Brand protection can be done by registering the brand to the Directorate General of Intellectual Property thus registered brand owners will get exclusive rights to the brand in the form of a certificate using its own brand or to give permission to others to use. Protection of trademarks aforesaid stipulated in Article 3 of Act 15 of 2001 About Brand.

Brand protection in reality does not match that expected by the PT. Dagadu Djokdja occurring stunted as the owner of the registered mark Dagadu Djokdja because the street vendors and manufacturers who are in Yogyakarta Malioboro market conduct violations by selling T-shirts brands Dagadu Djokdja similar to PT. Dagadu Djokdja occurring stunted. It causes damage to the owner of the registered mark Dagadu Djokdja.

Djokdja Dagadu brand protection against trademark infringement is happening to the legal effectiveness of the components include: substance Nandang Law, law enforcement, the community and its culture to the implementation of the legal protection of the brand can be achieved as well as the need for firmness of brand owners to sue the violators brand Dagadu Djokdja to legal

Keywords: *effectiveness, implementation, protection, brand Dagadu Djokdja*

A. Pendahuluan

Perkembangan perekonomian yang berlangsung sangat cepat, arus globalisasi dan perdagangan bebas serta kemajuan teknologi, telekomunikasi dan informasi telah memperluas ruang gerak transaksi barang dan atau jasa yang ditawarkan dengan lebih bervariasi, baik barang dan jasa produksi dalam negeri maupun barang impor. Oleh karena itu, barang dan jasa produksi merupakan suatu hasil kemampuan dari kreativitas manusia yang dapat menimbulkan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI).¹

Pengelompokkan HaKI menurut Bambang Kesowo, menyatakan bahwa HaKI pada intinya terdiri dari beberapa jenis yang secara tradisional dipilih dalam dua (2) kelompok, yaitu: Hak Cipta (*Copyright*), dan Hak atas Kekayaan Industri (*industrial property*) yang berisikan : Paten, Merek, Desain Produk Industri, Persaingan Tidak Sehat, Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang.²

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek:

“Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Kebutuhan, kemampuan dan kemajuan teknologi atas suatu produk sekarang ini merupakan pasar bagi produksi-produksi pengusaha pemilik merek dagang dan jasa. Pada dunia usaha para produsen memberikan tanda atau citra tersendiri pada barang dan jasa hasil produksi produk mereka yang dikenal dengan istilah merek. Merek digunakan untuk membedakan suatu produk dengan produk lain, terutama untuk barang atau jasa yang sama dan sejenis.

Semua produsen ingin produk mereka memperoleh akses yang sebebas-bebasnya ke pasar, oleh karena itu perkembangan di bidang perdagangan dan industri yang sedemikian pesatnya memerlukan peningkatan perlindungan

¹ Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, cet ke-3, Bandung, Penerbit: Citra Aditya Bakti, 2003, Hlm.159

² Bambang, Kesowo, *Kebijakan Di Bidang Hak Milik Intelektual Dalam Hubungannya Dengan Dunia Internasional Khususnya GATT*, Panel Diskusi Bidang Hukum Hak Milik Intelektual DPP Golkar, Jakarta 4 Februari 1992, hal.17

terhadap teknologi yang digunakan dalam proses pembuatan, apabila kemudian produk tersebut beredar di pasar dengan menggunakan merek tertentu, maka kebutuhan untuk melindungi produk yang dipasarkan dari berbagai tindakan melawan hukum pada akhirnya merupakan kebutuhan untuk melindungi merek tersebut.

Dalam hubungan ini hak-hak yang timbul dari hak kekayaan intelektual, khususnya hak atas merek suatu produk akan menjadi sangat penting yaitu dari segi perlindungan hukum, karenanya untuk mendirikan dan mengembangkan merek produk barang atau jasa dilakukan dengan susah payah, mengingat dibutuhkannya juga waktu yang lama dan biaya yang mahal untuk mempromosikan merek agar dikenal dan memperoleh tempat di pasaran.

Salah satu cara untuk memperkuat sistem perdagangan yang sehat dalam mengembangkan merek dari suatu produk barang atau jasa, yaitu dengan melakukan perlindungan hukum terhadap pendaftaran merek.³

Pasal 3 Undang-undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek menyebutkan: “Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”.

Dengan demikian, hak atas merek memberikan hak yang khusus kepada pemiliknya untuk menggunakan, atau memanfaatkan merek terdaftarnya untuk barang atau jasa tertentu dalam jangka waktu tertentu pula.

Perlindungan terhadap hak atas merek bagi pemegang merek di Indonesia akhir-akhir ini masih sering dijumpai adanya pelanggaran terhadap hak atas merek tersebut. Indonesia saat ini masih digolongkan sebagai Negara yang masuk dalam “*priority watch list*” dari Amerika Serikat hal ini dikarenakan tingkat pembajakan dalam bidang HaKI yang begitu tinggi.

Tingginya tingkat pembajakan tersebut dikarenakan masih kurangnya pengetahuan masyarakat dalam bidang HaKI masyarakat masih enggan untuk mendaftarkan hasil kreatifitasnya untuk mendapatkan perlindungan secara hukum,

³ Hariyani, Iswi, *Prosedur Mengurus HaKI yang Benar*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010, hal.87

justeru kebanyakan mereka malah memilih untuk mendompleng merek lain yang terkenal yang sudah terdahulu didaftarkan. Pelanggaran tersebut terjadi sejak dahulu sampai sekarang dengan menggunakan teknologi yang lebih maju dan dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Salah satu produk yang bersifat global yang membutuhkan perlindungan terhadap hak atas merek tersebut adalah Dagadu Djokdja

PT. Aseli Dagadu Djokdja merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri *merchandise* yang merupakan salah satu produsen cinderamata pariwisata khas Kota Yogyakarta dengan mengusung tema utama *Everything about Djokdja*. Dalam penjualan produk *merchandise* yang diproduksi oleh PT. Aseli Dagadu Djokdja menggunakan Merek Dagang yang telah didaftarkan yaitu Merek Dagadu Djokdja yang berupa logo mata dan arti dari kata Dagadu dalam logo merek tersebut adalah berasal dari bahasa Jawa Walikan yang berarti MATAMU.

Menurut Pasal 3 Undang-undang No 15 tahun 2001 Tentang Hak Merek, Produk Merek Dagadu Djokdja yang diproduksi dan dipasarkan secara langsung oleh pihak PT. Aseli Dagadu Djokdja ini termasuk dalam merek yang dilindungi. Fakta yang muncul dari industri perdagangan produk *merchandise* merek Dagadu Djokdja milik PT. Aseli Dagadu Djokdja mengalami pelanggaran hak merek yang dilakukan oleh oknum produsen dan pedagang di Pasar Malioboro Kota Yogyakarta yang menjual *merchandise* berupa kaos oblong bermerek Dagadu Djokdja yang dipalsu dengan kata lain merek yang dijual oleh pedagang di Pasar Malioboro Kota Yogyakarta tidak didaftarkan dan juga tidak mendapat lisensi dari pemilik merek yaitu PT. Aseli Dagadu Djokdja.

PT. Aseli Dagadu Djokdja yang telah memiliki badan hukum secara resmi ini merasa kesulitan dengan ulah para oknum yang telah membuat mereka mengalami kerugian. Selain itu PT. Aseli Dagadu Djokdja juga tidak membawa perkara pelanggaran hak atas merek ini ke jalur litigasi, PT. Aseli Dagadu Djokdja cenderung diam dalam menyikapi oknum pedagang yang curang, sehingga akibatnya yang timbul membuat PT. Aseli Dagadu Djokdja mengalami pelanggaran atas hak merek Dagadu Djokdja yang telah dibuatnya. Di sisi lain PT. Aseli Dagadu Djokdja merasa pesimis mendapat ganti rugi jika membawa kasus

ini ke jalur litigasi, karena para pelanggar hak merek ini banyak didominasi oleh para pedagang kecil yang kurang cukup modal dan belum berbadan hukum

Merek Dagadu Djokdja tersebut merupakan suatu merek dagang yang telah memperoleh hak atas merek melalui pendaftaran di Kantor Merek sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

B. Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektifitas pelaksanaan perlindungan hukum merek Dagadu Djokdja terhadap persamaan pada pokoknya atau keseluruhan?
2. Apa hambatan dalam perlindungan hukum merek Dagadu Djokdja?

C. Metode

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Dimaksud dengan penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang di fokuskan pada penelitian lapang yang dilakukan dengan terjun langsung mengunjungi lokasi penelitian. Dalam konteks penelitian ini maka, penelitian terhadap pelaksanaan suatu aturan perundang-undangan.

B. Metodependekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis selain berdasarkan peraturan perundang-undangan (data sekunder), juga berdasarkan fakta di lapangan (data primer) terkait perlindungan konsumen. Maksud dari metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu pembahasan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Undang-Undang No 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Serta dikaitkan dengan teori-teori hukum dengan melihat realita yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini menemukan permasalahan pelanggaran hak merek terhadap persamaan pada pokoknya atau keseluruhanoleh pedagang dan produsen kaos

oblong merek Dagadu Djokdja yang dikaitkan dengan efektifitas pelaksanaan perlindungan hukum merek.

Untuk mendapatkan data tersebut, dilakukan penelitian langsung ke obyek penelitian, yaitu PT. Aseli Dagadu Djokdja untuk mendapatkan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung.

D. Pembahasan

A. Efektifitas Pelaksanaan Perlindungan hukum Merek Dagadu Djokdja Terhadap Persamaan pada Pokoknya atau Keseluruhan

Dalam menentukan tolok ukur efektif atau tidaknya suatu ketentuan yang dalam hal ini berkaitan dengan efektifitas pelaksanaan perlindungan hukum merek Dagadu Djokdja terhadap persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya ukurannya tidak sama dalam setiap pandangan masing-masing orang, sehingga tolok ukur efektif ini bersifat relatif.

Penulis berpendapat bahwa suatu ketentuan dikatakan efektif apabila telah mencapai tujuan yang diharapkan karena pada pokoknya hukum menentukan peran apa yang sebaiknya dilakukan oleh para subyek hukum sehingga hukum akan semakin efektif apabila peranan yang dijalankan oleh para subyek hukum semakin mendekati apa yang telah ditentukan dalam hukum.

Banyak faktor penentu yang dapat digunakan untuk menilai keefektifan seperti yang telah diuraikan pada pembahasan efektivitas hukum. Untuk menentukan efektif atau tidak Pasal 3 Undang-undang No.15 tahun 2001 Tentang Merek Pasal ini dikatakan efektif apabila substansi, lembaga dan penegak hukum, masyarakat dan budayanya telah sesuai dengan tujuan yang diharapkan:

1. Substansi Pasal dalam Undang-undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek

Undang-undang No.15 Tahun 2001 merupakan undang-undang merek terbaru yang merupakan hasil penyempurnaan dari undang-undang merek sebelumnya. Substansi pasal dapat mencapai tujuan yang diharapkan apabila telah sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut sebagaimana ditentukan dalam ilmu perundang-undangan dan sesuai dengan

tujuan dibentuknya suatu ketentuan hukum. Dengan ketentuan tersebut maka substansi suatu peraturan perundang-undangan dapat dikatakan baik dan efektif.

Dilihat dari substansinya keberadaan Undang-undang No15 Tahun 2001 tentang Merek khususnya pada pasal 3 sudah memberikan perlindungan yang cukup bagi pemilik merek terdaftar yang berbunyi:

“Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”.

Ketentuan Pasal 3 Undang-undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek merupakan inti terhadap perlindungan hak merek dengan memberikan jaminan kepada pemilik merek dengan sebuah hak eksklusif berupa sertifikat merek dengan jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang dan dapat diperpanjang, dengan demikian pemilik merek berhak menggunakan mereknya sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut dengan cara perjanjian lisensi.

Perlindungan hukum hak merek ini tidak hanya sebatas Pasal 3 Undang-undang No.12 tahun 2001 tentang Merek saja, juga didukung dengan pasal berikutnya yaitu pasal 4 tentang pemohon yang beriktikad tidak baik, pasal 5 mengenai merek yang tidak didaftarkan dan Pasal 6 mengenai pendaftaran merek yang harus ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Sistem pendaftaran merek secara *first to file* juga merupakan suatu bentuk perlindungan oleh undang-undang terhadap merek yang terdaftar, bahwa pendaftaran suatu merek hanya akan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mengajukan permintaan pendaftaran untuk sebuah merek, dan Negara tidak memberikan pendaftaran untuk merek yang memiliki persamaan dengan merek yang diajukan lebih dahulu tersebut kepada pihak lain untuk barang/jasa sejenis. Dengan demikian pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran diberi hak eksklusif dan prioritas untuk mendapatkan pendaftaran merek dan diakui sebagai pemilik merek yang sah.

pendaftaran merek menggunakan sistem *first to file* diatur dalam Pasal 11 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek menyebutkan:

“Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali diterima di negara lain, yang merupakan anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau anggota *Agreement Establishing the World Trade Organization*”.

Jangka waktu untuk perlindungan hak merek juga diatur dalam pasal 28 Undang-undang No.15 tahun 2001 tentang merek yang menyebutkan:

“Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. “

Perlindungan hukum merek yang telah diatur pada pasal-pasal di atas hanya melaksanakan perlindungan kepada hak merek jika ada pemohon pendaftaran merek yang beriktikad tidak baik. Undang-undang merek ini juga memberika perlindungan jika ada pelanggaran terhadap pelanggaran persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, juga bisa disebut dengan pemlasuan, penjublukan dan pembajakan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Ketentuan lain mengenai perlindungan merek ini juga ada dalam pasal 76 ayat 1 Undang-undang No.15 Tahun 2001 Tetang Merek yang berbunyi:

“Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa:

- a. gugatan ganti rugi dan/atau
- b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut”

Undang-undang merek juga memberikan sangsi dengan tegas kepada para oknum atau pelaku pelanggaran hak merek terhadap persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan memberikan ketentuan pidana yang tertera pada pasal 90, 91, 92, 93, 94 dan 95 Undang-undang No.15 tahun 2001

Dengan demikian, substansi Undang-undang No.15 tahun 2001 tentang Merek ini sangat jelas dan tegas melindungi hak merek yang terdaftar dengan memberikan jaminan sebuah hak eksklusif dan memberikan sangsi-sangsi yang tegas kepada oknum pelanggar hak merek atas persamaan pada pokoknya atau keeluruhan.

2. Lembaga dan penegak hukum

Dari segi lembaga, suatu ketentuan hukum dapat dikatakan efektif apabila tatanan lembaga-lembaga yang terkait dengan ketentuan tersebut telah melakukan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Lembaga-lembaga yang terkait dengan pasal ini adalah Lembaga penjamin perlindungan hukum merek atau Direktorat Jenderal Haki sebagai Pemerintah sebagai pengawas sekaligus pemberi kebijakan bagi pelaksanaan perlindungan hukum merek.

Dalam Undang-undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek Direktorat Jenderal Haki memang sudah menjadi pusat perlindungan hukum merek sebagai pengawas dan sekaligus pemberi kebijakan, akan tetapi dalam ketentuan undang-undang tersebut juga terdapat penegak hukum lain yaitu:

a. Anggota polisi atau PNS (pegawai Negeri sipil)

Anggota polisi atau PNS (pegawai Negeri sipil) yang ditunjuk untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran pidana merek yang diatur dalam pasal 89 ayat 1 Undang-undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek yang berbunyi:

“Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Direktorat Jenderal, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Merek”.

b. Hakim Pengadilan Niaga

Hakim sebagai orang yang mengadili perkara pelanggaran merek di pengadilan niaga.

c. Lembaga Arbitrase

Lembaga Arbitrase merupakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang diatur dalam pasal 84 Undang-undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek yang berbunyi:

“Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Pertama Bab ini, para pihak dapat menyelesaikansengketa melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa”.

Penegak hukum dan lembaga di atas berjalan untuk melakukan perlindungan jika ada gugatan saja, karena Undang-undang No.15 tahun 2001 tentang merek memberikan perlindungan hak merek sebatas delik aduan sehingga jika tidak ada pengaduan kepada penegak hukum, maka tidak ada pula penegakan hukum oleh penegak hukum secara tegas.

Adapun upaya perlindungan preventif dan represiv atas pelanggaran hak merek Dagadu Djokdja terhadap persamaan pada pokoknya atau keseluruhan adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan Preventif

Perlindungan preventif merupakan upaya perlindungan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan PT. Aseli Dagadu Djokdja akibat pelanggaran dalam praktek perbanyakan oleh produsen *merchandise* berupa kaos oblong Merek Dagadu Djokdja oleh Produsen dan Pedagang Kecil di Pasar Malioboro Yogyakarta.

Untuk langkah pertama perlindungan hukum secara preventif ini Merek Dagadu Djokdja milik PT. Aseli Dagadu Djokdja telah di daftarkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada tahun 1997 hingga batas akhir perlindungan tahun 2007 dan diperpanjang sampai sekarang, persetujuan ini adalah bentuk kepemilikan Hak Merek atas Merek Dagadu Djokdja untuk memproduksi serta memasarkan produk-produk yang menggunakan Merek Dagadu Djokdja. Berdasarkan hal ini maka PT. Aseli Dagadu djokdja Dikatakan sebagai pemegang Hak Merek atas Merek Dagadu Djokdja.

Pasal 3 Undang-undang no.15 Tahun 2001 Tentang Merek menyebutkan:

“Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”.

Dengan demikian pasal 3 undang-undang Merek ini menjamin perlindungan kepada PT. Aseli Dagadu Djokdja selaku pemohon pendaftar Merek Dagadu Djokdja memiliki Hak Eksklusif berupa bukti sertifikat Hak atas Merek yang diberikan oleh negara untuk menggunakan sendiri Merek tersebut dan memproduksi barang bermerek Dagadu Djokdja atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

2. Perlindungan represif

Perlindungan represif merupakan upaya perlindungan yang diberikan kepada PT. Dagadu Djokdja selaku pemilik Merek Dagadu Djokdja yang telah mengalami kerugian akibat pelanggaran terhadap praktek perbanyakan produk *mechandaise* yang bermerek Dagadu Djokdja oleh produsen dan pedagang kecil yang menjiplaknya.

Tindakan yang telah dilakukan pihak PT. Dagadu Djokdja terkait pelanggaran Hak Merek ini adalah melayangkan somasi kepada para produsen dan pedagang yang memproduksi dan menjual merchandise Merek Dagadu Djokdja yang tidak asli. Menurut pihak Dagadu Djokdja pihaknya berhak atas perlindungan proteksi design dan Hak komersial atas tindak pelanggaran persamaan pada pokoknya atau keseluruhan terhadap Merek Dagadu Djokdja. Pihak Dagadu Djokdja juga berdalih sulit mengurus hal tersebut karena banyaknya para produsen yang bergerak di bidang penjualan merchandise.

Meskipun banyak pelanggaran serta kasus penyalahgunaan Hak Merek, pihak PT. Dagadu Djokdja cenderung tidak mengambil tindakan yang tegas, hal ini dikarenakan para pelanggar atau pedagang itu lahir dengan dana yang cukup minim, hal inilah yang membuat pihak PT. Dagadu Djokdja pesimis mendapat ganti rugi secara materiil meskipun telah membawa para pelanggar Hak Merek itu ke jalur hukum sesuai peraturan yang berlaku. Pihak PT. Dagadu Djokdja

beranggapan, lebih baik memperbaiki kinerja serta memperketat sistem internal dari pada membawa pedagang itu ke jalur hukum.

Somasi atau peringatan yang dilayangkan PT.Aseli Dagadu Djokdja kepada Produsen dan pedagang yang menjual kaos oblong merek Dagadu Djokdja bukan termasuk dalam kategori perlindungan hukum Represif karena somasi atau peringatan tersebut hanyalah sebuah usaha atau wewenang pemilik merek sendiri untuk melindungi mereknya, akan tetapi gugatanlah yang merupakan bentuk dari perlindungan terhadap pelanggaran dalam permasalahan ini.

3. Masyarakat dan budayanya

Masyarakat adalah suatu organisasi manusia yang saling berhubungan satu sama lain, sedangkan kebudayaan adalah suatu sistem normal dan nilai yang teorganisasi menjadi pegangan bagi masyarakat tersebut. Faktor masyarakat dan kebudayaan ini memegang peranan sangat penting, hal ini berkaitan dengan taraf kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat. Kesadaran hukum merupakan suatu proses yang mencakup unsur pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum.

Masyarakat indonesia khususnya masyarakat jawa adalah masyarakat yang komunal atau masih tradisional yang menjunjung nilai-nilai harmonisasi buyayanya. Budaya masyarakat komunal itu sendiri tidak ada perintah atau pedoman untuk melindungi merek sehingga pelanggaran merek yang terjadi bukanlah suatu pelanggaran dalam budaya karena budaya masyarakat hanya mengenal harmonisasi pantas dan tidak pantas. Oleh karena itumasih sangat minim perlindungan merek terhadap budaya masyarakat yang masih tradisional.

Dalam masalah pelanggaran ini, suatu ketentuan hukum dapat dikatakan efektif apabila budaya dan masyarakat yang bersangkutan telah sesuai dengan ketentuan tersebut. Dalam Pasal 3 Undang-undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek bertujuan agar masyarakat sadar hukum bisa menghargai merek orang lain yang telah didaftarkan dengan tidak membiasakan meniru merek lain untuk memperoleh keuntungan ekonomi serta agar masyarakat kreatif terhadap produk ciptaannya sendiri yang didaftarkan dan memiliki hak merek.

B. Hambatan dalam Efektifitas Pelaksanaan Perlindungan Hukum Merek Dagadu Djokja Terhadap Persamaan Pada Pokoknya atau Keseluruhan

Beberapa hambatan yang dialami saat pelaksanaan perlindungan hukum ini adalah sebagai berikut:

- a. Tidak adanya perlindungan hukum merek dalam pandangan budaya masyarakat yang komunal atau tradisional

Budaya masyarakat komunal atau tradisional tidak mengenal tentang perlindungan merek dalam hal ini adalah perlindungan merek dagadu Djokdja karena budaya masyarakat hanya mengenal harmonisasi atau nilai pantas dan tidak pantas sehingga pelanggaran merek Dagadu Djokdja bukanlah suatu pelanggaran dalam pandangan masyarakat komunal atau tradisional.

- b. Semakin banyaknya sarana cetak yang ada dan tidak terkendali penggunaannya

Di Kota Yogyakarta banyak sekali usaha percetakan, baik yang sudah berbadan hukum maupun percetakan retail yang kecil. Usaha percetakan ini sangat dimungkinkan terjadinya produksi mechandise yang berkaitan dengan Merek Dagadu Djokdja Contoh kasus yang sudah terjadi adalah beberapa pedagang kecil membeli suatu contoh mechandise (kaos) yang resmi. Kemudian dari satu contoh kaos yang ada itu, para pedagang kemudian menggandakan atau memperbanyak kaos tersebut dengan memproduksi secara masal dan dijual di masyarakat umum.

Design kaos oblong Merek Dagadu Djokdja yang dikeluarkan secara resmi oleh PT. Dagadu Djokdja secara cepat beredar di pasaran, khususnya di Kota Yogyakarta Tetapi peredaran yang terjadi itu tidak sebanding dengan data penjualan pihak PT. Dagadu Djokdja itu sendiri. Pihak Dagadu Djokdja menambahkan tidak mungkin mengawasi jalannya usaha percetakan di Kota Yogyakarta karena terlalu banyak usaha yang ada.

c. Faktor ekonomi para pedagang

Faktor ekonomi yang dimaksud dalam hal ini adalah sebagai berikut, yang pertama, para pedagang yang menjual dagangannya dalam jumlah kecil dan tidak mempunyai Merek terkenal mengaku tidak mendapat laba yang cukup besar dari hasil berdagang.

Sehingga untuk mengurus pendaftaran untuk memperoleh Hak Merek memerlukan biaya yang tidak sedikit dan waktu yang lama juga prosedur yang rumit bagi usaha kecil yang tidak memiliki banyak modal oleh karena itu bagi mereka hal tersebut malah membuang waktu dan membuang uang. Yang kedua jika pihak PT. Dagadu Djokdja membawa ke jalur hukum, para pedagang itu tidak bisa mengganti kerugian materiil yang telah diderita oleh para pedagang tersebut.

d. Kurangnya kesadaran mengenai pemahaman Hak Merek dan resiko pelanggarannya

Mengingat para pedagang yang ada tidak semuanya berpendidikan yang cukup, maka pengetahuan yang mereka punya tidaklah cukup banyak pula, dalam hal Hak Merek, para pedagang itu tidak mengetahui apa itu Hak Merek, mereka menganggap bahwa tidak ada pelanggaran saat mereka turut melakukan proses perbanyakan produk merchandaise Merek Dagadu Djokdja milik pihak PT. Aseli Dagadu Djokdja

Pedagang yang berada di kawasan mengatakan bahwa barang yang dijual ini adalah produksi dari Mereka sendiri dan sudah dari dulu mereka terlanjur setia dengan Dagadu, jadi mereka mestinya bebas menjual serta memasarkan barang dagangannya sendiri tanpa ada pihak lain yang harus ikut campur.

e. Kurang tegasnya PT. Aseli Dagadu Djokdja dalam melindungi Merek miliknya sendiri

Menurut data dan fakta yang ada, masih banyak sekali dijumpai berbagai macam kasus pelanggaran yang berkaitan dengan Hak Merek. Sebagai contohnya adalah pelanggaran Hak Merek atas merchandaise atau kaos Dagadu Djokdja yang diciptakan oleh PT. Aseli Dagadu Djokdja. Tetapi nyatanya, belum ada pelanggar Hak Merek atas merchandais ini yang dibawa ke jalur hukum.

Menurut pihak PT. Aseli Dagadu Djokdja pihaknya lebih mengambil sikap untuk diam, hal ini dikarenakan oleh faktor sosiologi. Pihaknya menyatakan, meskipun kita mengalami kerugian akibat pelanggaran Hak Merek, tetapi kita kasihan untuk membawa ke jalur hukum, para pedagang itu tidak punya mata pencaharian lagi selain berdagang, selain itu para pedagang itu punya keluarga yang harus dihidupi.

E. Penutup

1. Efektifitas pelaksanaan perlindungan hukum merek Dagadu Djokdja terhadap persamaan pada pokoknya atau keseluruhan

Efektifitas Pelaksanaan Perlindungan Hukum Merek Dagadu Djokdja Terhadap Persamaan Pada Pokoknya atau Keseluruhannya tidak efektif dilihat dari tolok ukurnya karena hanya komponen substansi Undang-undang No.15 Tahun 2001 tentang merek saja yang melindungi merek Dagadu Djokdja secara tegas dengan memberikan hak eksklusif bagi pemegang merek yaitu PT. Aseli Dagadu Djokdja sedangkan dua komponen lembaga dan penegak hukum, masyarakat dan budayanya tidak melaksanakan perlindungan hukum merek Dagadu Djokdja. Hal ini disebabkan oleh kurang tegasnya PT. Aseli Dagadu Djokdja dalam melindungi mereknya sendiri yang seharusnya menggugat pelanggar merek Dagadu Djokdja ke jalur hukum karena somasi adalah wewenangnya tapi bukan termasuk dalam perlindungan hukum.

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh PT. Aseli Dagadu Djokdja dalam pelaksanaan perlindungan hukum merek Dagadu Djokdja:
 - a. Tidak adanya perlindungan hukum merek dalam pandangan budaya masyarakat yang komunal atau tradisional.
 - b. Banyaknya sarana perbanyakan (mesin cetak) yang tidak bisa dikontrol penggunaannya sehingga mempermudah pelanggaran hak merek
 - c. Faktor ekonomi masyarakat
 - d. Kurangnya pemahaman mengenai hak merek dan resiko pelanggarannya oleh pedagang kecil yang menjual kaos oblong merek Dagadu Djokdja

- e. Kurang tegasnya PT. Aseli Dagadu Djokdja dalam melindungi Merek miliknya sendiri

A. Saran

1. Bagi PT. Aseli Dagadu Djokdja lebih tegas dalam melaksanakan perlindungan hukum represif dengan cara menggugat para pelanggar hak merek Dagadu Djokdja ke jalur hukum sehingga komponen efektifitas hukum yaitu penegak hukum dan masyarakat bisa berjalan untuk turut mendukung perlindungan hukum hak merek Dagadu Djokdja agar PT. Aseli Dagadu Djokdja sebagai pemilik merek tidak dirugikan terus-menerus.
2. Bagi Pedagang dan produsen yang menjual kaos oblong merek Dagadu Djokdja diharapkan lebih memperhatikan peraturan perundang-unangan yang berlaku mengenai Hak Merek dan dapat menghormati karya orang lain, agar tidak merugikan pihak lain.

F. Daftar Pustaka

- Bambang, Kesowo, 1992, *Kebijakan Di Bidang Hak Milik Intelektual Dalam Hubungannya Dengan Dunia Internasional Khususnya GATT*, Panel Diskusi Bidang Hukum Hak Milik Intelektual DPP Golkar, 4Februari, Jakarta.
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah, 1997, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Penerbit: PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hariyani, Iswi, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta.